

ABSTRACT

This research is motivated by the not yet optimal implementation of the Voter Data Update Policy at the General Election Commission of the City of Bandung. Based on the research background, researchers formulated the problem as follows: How to Implement Voter Data Update Policy at the General Election Commission in Bandung City? What factors support and hinder the Implementation of Voter Data Update Policy in the General Election Commission of Bandung City? What efforts have been made by the General Election Commission in the Implementation of the Electoral Data Update Policy at the General Election Commission of Bandung City?

The theory used in this study is the policy implementation theory from Edwards III specifically crucial factors or variables in policy implementation which include communication, resources, disposition / attitude, and bureaucratic structure.

Based on this theoretical approach, researchers formulated the following propositions: Implementation of Voter Data Update Policies at the General Election Commission of Bandung City took place optimally through approaches to policy implementation factors consisting of communication, resources, disposition / attitude, and bureaucratic structure. Factors that influence the implementation process of Voter Data Update at the General Election Commission of Bandung City can be overcome by meeting the demands and needs that support the implementation of the policy.

The research method used is descriptive research method, with a qualitative approach. Data was obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation. Determination of informants was done by purposive sampling technique.

The results of this study indicate that the Implementation of the Electoral Data Updating Policy at the General Election Commission in Bandung City has not been optimal, with indications of a lack of time in socializing policies with partnership development, low quality of human resources, the performance of officials who are not optimal in coordinating and difficulties in providing adequate material incentives, and the division of authority in the implementation of Voter Data Updates (PPDP) and not in accordance with their duties as well as low community participation.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung ? Faktor – faktor apakah yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung? Upaya-upaya apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edwards III khususnya faktor-faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.

Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berlangsung optimal melalui pendekatan faktor-faktor implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Pemutakhiran Data Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dapat diatasi dengan pemenuhan tuntutan dan kebutuhan yang menunjang implementasi kebijakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Data Pemilih Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung belum optimal, dengan indikasi-indikasi masih minimnya waktu dalam mensosialisasikan kebijakan dengan pengembangan kemitraan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, wujud kinerja aparat yang belum optimal dalam berkoordinasi serta kesulitan dalam memberikan insentif material yang memadai, dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan belum sesuai dengan bidang tugasnya serta rendahnya partisipasi masyarakat.